

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, 2006, "Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Koordinator UPT Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kota Surakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta.
- Adolf, Huala, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1993, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ilmar, Aminuddin, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jeddawi, Murtir, 2005, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Kantor Bank Indonesia Semarang, 2003, "Pemetaan Peraturan Daerah dan Potensi Dampaknya Terhadap Perkembangan Ekonomi di Jawa Tengah". *Laporan Penelitian*, Kerjasama Kantor BI Semarang dan LKSE FE UNDIP, Semarang.
- Koesomohatmaja, Djaenal Hoesen, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Alumni, Bandung.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta, Liberty.
- Muchsin, 2005, *Aneka Wacana Hukum Ekonomi*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNS, Surakarta.
- Munggiasih, Bunga, 2009, Birokrasi Masih Jadi Hambatan Investasi, *Tempo Interaktif*, 27 Januari 2009, Jakarta.

- Nasution, 1982, *Metode Research*, Jemmars, Bandung.
- Pemerintah Kota Surakarta, Tanpa Tahun. "Unit Pelayanan Terpadu", *Booklet*, Surakarta.
- Prawihatmi, Ch. Yekti, 2006, Upaya Meningkatkan Investasi Dengan One Stop Service Plus,
http://www.yipd.or.id/publikasi/index.php?act=ndetail&sub=article&p_id.=42, Akses tanggal 1 Pebruari 2009.
- Rajagukguk, Erman, 1999, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi". *Jurnal Hukum FH UII No. 111*, Yogyakarta.
- Rejeki, Sri, 2009, "169 Perda di Surakarta Menghambat Investasi", *Kompas*, 23 Januari 2009.
- Rosyidah, Rakhmawati N., 2003, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Saidi, 2005, *Bussines News*. Senin 21 Nopember 2005, Jakarta.
- Sanjaya, Maria, 2007, "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Sistem Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri di Kota Surakarta". *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS, Surakarta.
- Santoso, Bambang, 2005, Permasalahan di Bidang Pelayanan Izin HO dan IMB di Kota Surakarta. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum UNS, Surakarta.
- Saputra. M. Nata, 1983, *Hukum Administrasi Negara*. Ed. 1 Cet. 1. Jakarta : CV. Rajawali. Sarundanjang, 1999. *Arus Balik kekuasaan ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sidharta. B. Arief, 1996, *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sitompul, Zulkarnain, 2008, "Investasi Asing Di Indonesia : Memetik Manfaat Liberalisasi. *Jurnal Legislasi Indonesia Vo. 5 No. 2 Juni 2008*. Direktorat Jenderal Peraturan perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Sudarmono, Bambang dan M. Wahyudin, 2006, Analisis Pengaruh Peran Investor Dan Unit Pelayanan Terpadu Terhadap Perkembangan Iklim Usaha di Wilayah Surakarta , *Skripsi*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta.

Sunggono, Bambang. 1997, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta,

Susanti, Ida, 2003, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Tiyanto, 2007, Pengembangan Pelayanan Birokrasi Untuk Peningkatan Investasi Daerah. *Makalah*. Disajikan dalam Seminar dan Ekspose Hasil Penelitian Penyimpangan Kehidupan Perekonomian dan Pengembangan Birokrasi Guna Peningkatan Investasi Produk Daerah di FH UNS 7 April 2007, Surakarta.

Utrecht, E., 1986. *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya.

Surat Kabar

Jawa Pos, "Penghambat Bisnis di Indonesia", 5 Juli 2005.

SOLOPOS, " Teknologi OSS Pemkot Ketinggalan", 30 Maret 2009.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 004 Tahun 1998 tentang Pembentukan organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 065/187/1/2005 tentang Tata Laksana Pelayanan Perijinan Pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Surakarta.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 066/188/1/2005 tentang Tim Pembina dan Tim Pertimbangan Perizinan UPT Kota Surakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No 9 Tahun 2005 Tentang Ijin Usaha, Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta.

Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Walikota Surakarta Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 A Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Surakarta di bidang Ekonomi.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Tata Laksana Perangkat Daerah Surakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No 9 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha, Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005.

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 004 Tahun 1998 tentang Pembentukan organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 065/187/1/2005 tentang Tata Laksana Pelayanan Perijinan Pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Surakarta.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 066/188/1/2005 tentang Tim Pembina dan Tim Pertimbangan Perizinan UPT Kota Surakarta.